

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KEBAKKRAMAT



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
CAMAT KEBAKKRAMAT
TAHUN 2024**

Alamat : Jl.Solo-Sragen Kode Pos 57762
No.Telp.(0271) 646925 Fax. (0271) 646925
KEBAKKRAMAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Tahun 2024 telah disusun. Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini merupakan perwujudan tanggung jawab Camat dalam memenuhi Tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Kami menyadari bahwa masih adanya berbagai kekurangan dalam Laporan ini dan adanya Program Kerja yang belum sepenuhnya tercapai secara optimal, maka guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka kami mengharapkan adanya saran, masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja instansi Kecamatan Kebakkramat.

Selanjutnya kami berharap kiranya Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Kebakkramat Tahun 2024 yang kami susun ini bermanfaat dan berguna bagi instansi Kecamatan Kebakkramat dan berlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Kebakkramat.

Kebakkramat, Januari 2025
CAMAT KEBAKKRAMAT



JOKO SUTRISNO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680305 199003 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar belakang.....	1
	B. Dasar Hukum.....	1
	C. Maksud dan tujuan.....	2
BAB II	DESKRIPSI OPD.....	3
	A. Tugas dan Fungsi.....	3
	B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan.....	4
	C. Standard Operating Procedure (SOP).....	4
	D. Perda/Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaa Program dan Kegiatan.....	5
	E. Struktur Organisasi (Bagan SOTK).....	5
	F. Kepegawaian.....	7
	1. Daftar Pegawai SKPD.....	7
	2. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang terisi.....	8
	3. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang belum terisi.....	8
	4. Daftar Pejabat Fungsional SKPD.....	9
	5. Daftar Pejabat Fungsional SKPD yang belum terisi.....	9
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	10
	A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	10
	B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	10
	C. Urusan Pilihan	10
	D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	10
BAB IV	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	11
	A. Program Penunjang Urusan	11
	B. Unsur Pemerintahan Wajib	16
	C. Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	
	D. Unsur Pilihan.....	16
	E. Unsur Pemerintahan Pendukung	16
	F. Unsur Penunjang.....	16
	G. Unsur Pengawasan	16
	H. Unsur Kewilayahan	17
BAB V	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	24
	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan.....	24
BAB VI	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	25
	A. Urusan Pendidikan.....	25
	B. Bidang Urusan Kesehatan.....	25
	C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	25
	D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	25

I. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.....	25
J. Bidang Urusan Sosial.....	25
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN.....	26
1. Inovasi.....	26
2. Penghargaan.....	26
BAB VIII PENUTUP.....	27
1. Kesimpulan.....	27
2. Saran.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/ Kota dimana menjadi unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya Camat mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Camat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut kami menyusun “Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024” yang merupakan gambaran keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas dalam waktu satu tahun.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
3. Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68).
11. Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 169 Tanggal 25 Oktober 2024
12. Perbup Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 20 Tanggal 25 Oktober 2024 Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Kebakkramat ini merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. Laporan

Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Kebakkramat yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Camat Kebakkramat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat Kebakkramat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan

Program Nasional yang dilaksanakan Kecamatan Kebakkramat terdiri dari:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah

C. Standar Operating Procedure

Standar Operasioal prosedur (SOP) Kecamatan Kebakkramat terdiri dari 14 Jenis SOP, antara lain sebagai berikut :

NO.	NAMA SOP	UNIT PENGAMPU SOP
1	Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu	Kasi. Pelayanan Umum
3	Prosedur Administrasi Pengajuan KTP	Kasi. Tata Pemerintahan
4	Pelayanan Legalisasi/ rekomendasi pengantar ijin keramaian	Kasi Keamanan dan Ketertiban
5	Prosedur Layanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi surat-surat;	Kasi. Pelayanan Umum
6	Permohonan ijin penelitian.	Kasi Keamanan dan Ketertiban
7	Penyusunan Rencana Kerja;	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
8	Penyusunan SPJ Keuangan;	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	Penyusunan RKA dan DPA;	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
10	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Permohonan Cuti PNS;	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Penerbitan SKP PNS;	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
13	Permohonan Penerbitan Kartu Pegawai;	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Permohonan Penerbitan Dokumen Kepegawaian (Pengajuan Pensiun, Kenaikan Pangkat dll)	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

D. Perda/Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

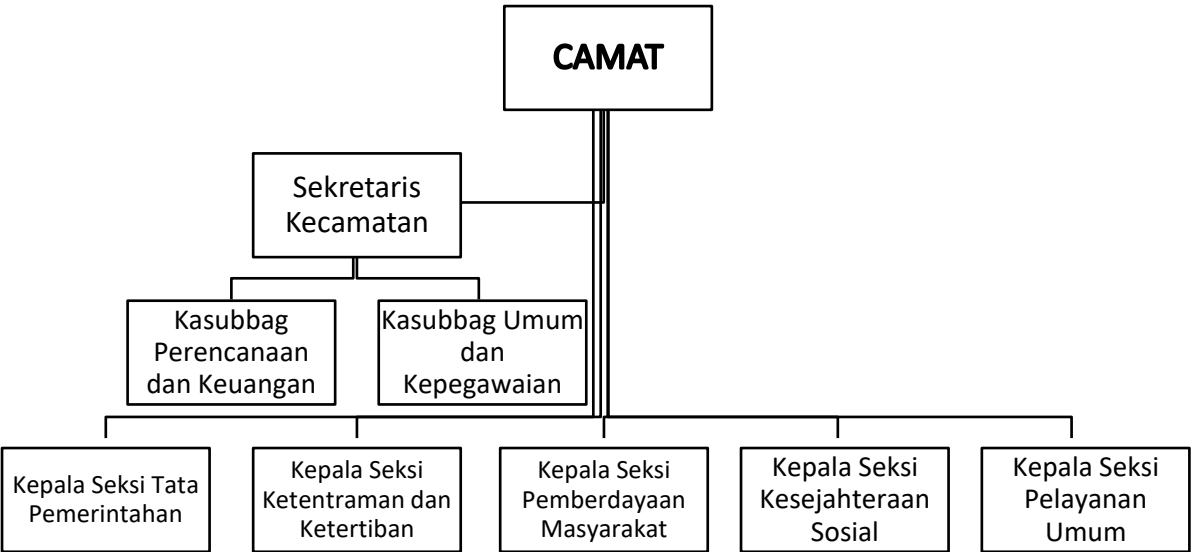
E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintah Kecamatan Kebakkramat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Adapun jabatan struktural yang ada di Kecamatan Kebakkramat adalah :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
- 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kebakkramat, sebagai berikut :



F. Kepegawaian

1. Daftar Pegawai Kecamatan Kebakkramat

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEG. (PNS/ CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	JOKO SUTRISNO, SH.,MM.	19680305 199003 1 010	PNS	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	DESY PRAMUDAISTY,SE.,MM	19751217 200501 2 007	PNS	Pembina (IV/a)
3.	SUMARDI,SH,MT.	19710407 199203 1 004	PNS	Pembina (IV/a)
4.	SUGIYATO,S.Pd.,S.H.,M.Hum.	19661115 199303 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
5.	ANI SUSILONINGSIH,SE,MM.	19630907 198802 1 001	PNS	Pembina (IV/a)
6.	RM ANDRIANTO BUDI UTOMO SE.Ak.,M.Si	19780826 200501 1 006	PNS	Pembina (VI/a)
7.	HENY SULISTYANINGSIH,S.Pd.,MM	19720205 199303 2 004	PNS	Pembina/(VI/a)
8.	MARDIYATI,S.Sos	19671124 199003 2 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
9.	NUR HAYATI, SE.	19720705 199602 2 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
10.	JOKO WALUYO	19780218 200801 1 013	PNS	Pengatur (II/c)
11.	DWI PRASETYO	19800928 200901 1 003	PNS	Pengatur Tk. I (II/d)

2. Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Kebakkramat Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANG KATAN
1	Joko Sutrisno, SH.,MM.	Camat	III	Memenuhi
2	Desy Prmaudsiasty,SE.,MM	Sekcam	III	Memenuhi
3	Sumardi,SH.MT.	Kasi Kesos	IV	Memenuhi
4	Heny Sulistyaningsih,SPd.,MM	Kasi Yanum	IV	Memenuhi
5	RM Andrianto Budiutomo,SE.Ak.,M.Si.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV	Memenuhi
6	Ani Susiloningsih,SE,MM.	Kasi Tapem	IV	Memenuhi
7	Sugiyato,S.Pd.,S.H.,M.Hum.	Kasi Trantib	IV	Memenuhi

8	Mardiyati,S.Sos.	Kasubag Umum & Kepegawaian	IV	Memenuhi
9	Nur Hayati,SE.	Kasubag Perencanaan & Keuangan	IV	Memenuhi

3. Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Kebakkramat Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1	NIHIL	

4. Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kecamatan Kebakkramat

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
1.	Joko Waluyo	19780218 200801 1 013	Pengelola adminstrasi Pemerintahan
2.	Dwi Prasetyo	19880907 200901 1 003	Pengadministrasi Umum

5. Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kecamatan Kebakkramat yang Belum Terisi

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	JUMLAH
1	Penyusun Program Anggaran	1
2	Pengelola Data Pelayanan Umum	1
3	Pengelola Pada Kasi Kesejahteraan sosial	1
4	Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1

BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 12.200.000,00 Realisasi: Rp. 12.200.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 unit	5 (100%)		
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 150.000.000,00 Realisasi: Rp. 150.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Kegiatan	1 (100%)		

			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 9.406.600,00 Realisasi: Rp. 9.399.500,00 Persentase: (99,92%)	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Pada SKPD 7 Bulan	7 (100%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Mebel	Data Belum Tersedia			
				2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 36.370.000,00 Realisasi: Rp. 35.870.000,00 Persentase:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 4 unit	4 (100%)		

				(98,63%)				
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.920.000,00 Realisasi: Rp. 1.920.000,00 Persentase: (100,00%)	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- undangan 12 dokumen	12 (100%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 20.532.000,00 Realisasi: Rp. 20.515.900,00 Persentase: (99,92%)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Bulan	12 (100%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 14.556.400,00 Realisasi: Rp. 14.556.400,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 7 laporan	7 (100%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.582.140.828,00 Realisasi:	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan	14 (100%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.545.227.816,00 Persentase: (97,67%)				
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 43.200.000,00 Realisasi: Rp. 39.485.326,00 Persentase: (91,40%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan	12 (100%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 107.040.000,00 Realisasi: Rp. 102.780.000,00 Persentase: (96,02%)	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan	12 (100%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran:	Jumlah Laporan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	4 (100%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 48.487.000,00 Realisasi: Rp. 47.578.500,00 Persentase: (98,13%)	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Unit			
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 41.939.200,00 Realisasi: Rp. 41.908.700,00 Persentase: (99,93%)	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor 12 paket	12 (100%)		
				2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 8.878.150,00 Realisasi: Rp. 8.549.150,00 Persentase: (96,29%)	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga 13 prosentase	11 (84,62%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran:	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 (100%)		

				Rp. 161.122.000,00 Realisasi: Rp. 156.991.000,00 Persentase: (97,44%)	SKPD 12			
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 825.050,00 Realisasi: Rp. 825.050,00 Persentase: (100,00%)	tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen	2 (100%)		
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya Laporan dokumen Anggaran 12 laporan	12 (100%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN		a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENG WASAN PEM ERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 97.745.000,00 Realisasi: Rp. 95.728.000,00 Persentase: (97,94%)	Jumlah Dokumen Yang di fasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen	12 (100%)		

			Pemerintahan Desa					
			b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1) Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 102.120.000,00 Realisasi: Rp. 102.120.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan	2 (100%)		
			c. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K Anggaran: Rp. 113.580.000,00 Realisasi:	Jumlah Orang Yang Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 50 orang	50 (100%)		

				Rp. 111.525.000,00 Persentase: (98,19%)				
			d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 23.400.000,00 Realisasi: Rp. 23.325.000,00 Persentase: (99,68%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 2 lembaga	2 (100%)		
				2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 16.380.000,00 Realisasi: Rp. 16.182.000,00 Persentase: (98,79%)	Kegiatan Musrenbangcam 1 laporan	1 (100%)		
			e. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 116.730.000,00 Realisasi: Rp. 113.900.000,00 Persentase:	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	12 (100%)		

			Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(97,58%)	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 laporan			
--	--	--	----------------------------------	----------	---	--	--	--

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Pendidikan

Kecamatan Kebakkramat Tidak melaksanakan Urusan Pendidikan

B. Bidang Urusan Kesehatan

Kecamatan Kebakkramat Tidak melaksanakan Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Kecamatan Kebakkramat Tidak melaksanakan Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Kecamatan Kebakkramat Tidak melaksanakan Bidang urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kecamatan Kebakkramat Tidak melaksanakan Bidang Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

Kecamatan Kebakkramat Tidak melaksanakan Bidang Urusan Sosial

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan secara umum telah dapat berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dimana tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan program dan kegiatan yang teralokasi pada DPA-SKPD dengan capaian 98% dan telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Untuk peningkatan bidang pelayanan masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga tingkat pemahaman serta pengetahuan perangkat kecamatan dapat mengikuti perkembangan baik dari segi peraturan yang harus diterapkan dan ketertiban administrasi birokrasi serta standar mutu pelayanan masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa

Kebakkramat, Januari 2025
CAMAT KEBAKKRAMAT


JOKO SUTRISNO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680305 199003 1 010